

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN
MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM)-MANDIRI**

(Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan, Gondokusuman Kota Yogyakarta)



SKRIPSI

Di ajukan Kepada Fakultas Dakwah untuk
Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
dalam Ilmu Sosial Islam

OLEH

SYUKRON MUNJAZI
04230049

PEMBIMBING

ARIF MAFTUHIN, M.Ag, MAIS

JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

KONSENTRASI PENGEMBANGAN MASYARAKAT

FAKULTAS DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2009



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syukron Munjazi
NIM : 04230049
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi
Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)-Mandiri (Studi Kasus Implementasi di
Kelurahan Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan bukan merupakan plagiasi atau saduran dari karya orang lain, kecuali pada kutipan yang disertakan footnote dengan sumber aslinya. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sangsi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2009

Mengetahui

Pembimbing

Arif Maftuhin M.Ag. MAIS
NIP: 150 318 460

Penyusun

Syukron Munjazi
NIM : 042 300 39



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Pengesahan Skripsi
Lamp : NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syukron Munjazi
NIM : 04230049
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan/ Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Sosial Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2009

Pembimbing


Arif Maftuhin M.Ag. MAIS
NIP: 150 318 460



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/109/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN
MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) - MANDIRI**

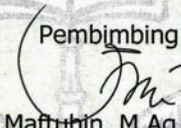
(Studi Kasus Implementasi di Kel. Demangan, Gondokusuman Kota Yogyakarta)

Nama : Syukron Munjazi
NIM : 04230049
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 27 Januari 2009
Nilai Munaqasyah : A -

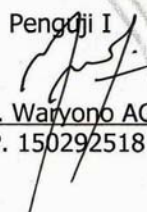
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

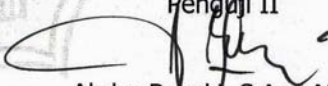
(Pembimbing


Arif Maftuhin, M.Ag., MAIS
NIP. 150318460


Pengaji I


Dr. H. Waryono AG, M.Ag.
NIP. 150292518

Pengaji II


Abdur Rozak, S.Ag., M.Si.
NIP. 150368351

Yogyakarta, 27 Januari 2009
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
Dekan


Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA
NIP. 150220788

Salaman Persembahan

*Skripsi Ini Ku Persembahkan Kepada
Ayahanda H. Sulaiman, dan Ibunda Hj. Mundarni
Saudara-saudaraku yang selalu memotifasi dan mendukungku
Serta Almamaterku tercinta*

MOTTO

سَيِّد الْقَوْمِ خَادِمُهُ

“Pemimpin adalah justru pelayan bagi masyarakat itu sendiri.”¹

“Surodiro Juhoningrat Lebur Dening Bangastuti”²

الإستقامة خير من ألف كرامة

“Berkesinambungan itu lebih baik dari pada seribu kemulyaan”³

¹ Di kutip dari nasehat sesepuh madrasah Qudsiyyah dalam majalah kenangan EL-WADA' tahun 2003

² Yang berarti bahwa kejayaan, harta, pangkat, serta kedudukan seseorang itu tak berarti apa-apa dibandingkan dengan keluhuran budi, nasehat tersebut ditulis oleh Ronggo warsito, (Motto ini Di kutip dari Majalah tahunan EL-Qudsy, Edisi IV Tahun 2003)

³ Di kutip dari nasehat nadhir madrasah Qudsiyyah dalam majalah tahunan EL-QUDSY tahun 1998

DAFTAR TABEL

1. Tabel I Data penduduk menurut Jenis kelamin
2. Tabel II Data penduduk menurut Menurut mata pencaharian
3. Tabel III Data penduduk menurut Tingkat pendidikan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbilamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta inayah-Nya, sehingga penyusun diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan Kota Yogyakarta)”**. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Saw, yang senantiasa mengiringi setiap do’a yang kami panjatkan, semoga Syafa’at senantiasa menaungi jiwa kami.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof.DR Bahri Ghazali, selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Azis Muslim M.Pd, selaku Ketua Jurusan PMI
4. Bapak Arif Maftuhin, M.Ag MAIS, selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PMI yang telah memperkaya khazanah keilmuan baru bagi penyusun.

6. Segenap Staff TU Jurusan PMI dan Staff TU fakultas bidang akademik dan bagian skripsi yang memudahkan administrasi bagi penyusun selama masa berproses dalam perkuliahan sampai pada tahap akhir studi.
7. Ayahanda H. Sulaiman dan Ibunda Hj. Mundarni, atas segala do'a yang dipanjatkan, serta perjuangan dan pengorbanan yang tak pernah padam untuk anak-anaknya. Terima kasih atas semua kebaikan nasihatnya yang akan selalu tersimpan dalam hati sanubari, semoga keberkahan, kesehatan akan selalu mengiringi kita semua
8. Untuk kakakku Khoirul Umam. Adikku, Abdul Wahab, Khusnul Aflah, terima kasih atas dukungan dan inspirasinya, sehingga kuliah ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Teman-teman Jurusan PMI angkatan 2004 dan teman-teman lainnya, kebersamaan kita akan selalu terkenang.
10. Teman-teman H@mro dan jama'ah Dzikir Nurussalam SBY Jogja, jama'ah Sholawat Syauqul Muhibbin, jama'ah Ahbabul Mustofa (Al-Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf) P.P Timoho wa bil khusus kang Iput El-hamro'i dan keluarga, terima kasih atas persahabatan kekeluargaan yang terjalin, semoga silaturahmi kita akan tetap terjaga.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Untuk "Opie_TQ" terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Semoga Allah SWT membalas segala amal baiknya, Amin. Terakhir kali, dengan segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan, penyusun berharap masukan dan koreksi dari pembaca, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Atas segala khilaf yang ada, penyusun memohon maaf yang sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 14 Januari 2009

Penyusun

Syukron Munjazi
NIM.04230049

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHANv
MOTTO	vi
DAFTAR TABEL	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	7
C. Rumusan masalah.....	13
D. Tujuan	13
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Telaah Pustaka	15
G. Kerangka Teoritik	17
H. Metode Penelitian.....	37
BAB II GAMBARAN UMUM PNPM-MANDIRI	42
A. Pengertian PNPM-Mandiri.....	42
B. Tujuan.....	42
C. Strategi, Prinsip, Pendekatan.....	44
D. Komponen Dan Harmonisasi Program.....	49
E. Pengelolaan Program.....	56
F. Struktur kelembagaan.....	66
G. Sumber Dan Penggunaan Dana.....	72
BAB III Pelaksanaan Program PNPM-Mandiri	76
A. Letak Geografis Kelurahan Demangan.....	76
B. Visi.....	81

C. Misi.....	82
D. Tujuan.....	82
E. Tahap-Tahap Pelaksanaan PNPM-Mandiri.....	83
1. Sosialisasi awal oleh fasilitator.....	84
2. Pemetaan problem dan kebutuhan.....	84
3. Persiapan awal pelaksanaan.....	95
4. Pelaksanaan kegiatan.....	97
5. Keberhasilan program.....	101
6. Kendala yang dihadapi.....	102
F. Struktur Pengurus BKM Kelurahan Demangan.....	104
G. Analisa hasil penelitian.....	105
BAB IV PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran-saran.....	110
C. Kata Penutup	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	116

ABSTRAKSI

Syukron Munjazi; NIM, 04230049 Pemberdayaan Masyarakat untuk mengurangi kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.) Skripsi dengan 115 halaman ini membahas mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat dengan konsep partisipatoris dalam menanggulangi kemiskinan melalui pelaksanaan program PNPM-Mandiri.

Kegagalan negara-negara berkembang memberantas kemiskinan tidak terlepas dari model pembangunan yang diterapkannya. Menurut para ahli, kegagalan yang terjadi dikarenakan model pembangunan yang berlaku di negara tersebut tidak memberi kesempatan pada rakyat miskin untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan kata lain, rakyat miskin hanyalah sekedar obyek dari pembangunan yang bercirikan top down dan memihak kepada segelintir orang serta pemerintahan yang sentralistik.

Paradigma pemberdayaan (*empowerment*) ingin mengubah kondisi tersebut dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang juga mereka pilih sendiri. Kelompok orang miskin ini juga diberi kesempatan untuk mengelola dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain.

Persoalan inilah yang mendasari adanya penelitian ini, yang dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi sebagai pendekatan dengan unsur yang terkait dalam memperoleh data, adapun bentuk analisis yang disajikan merupakan diskripsi dari hasil metode tersebut melalui uji silang dengan sumber-sumber yang berkompeten guna memperoleh obyektifitas data, hal ini karena penelitian yang dilakukan berbentuk partisipan reseach dengan mengacu pada teori *State Development* dengan *Society Development (people-centred development)*. yang berpadu dengan konsep para ahli tentang partisipasi dan pemberdayaan, maka permasalahan penelitian ini di jawab dalam wacana teoritis yang dinamis.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah proses pemberdayaan masyarakat partisipatoris yang dilakukan oleh BKM melalui program pinjaman bergulir dari dana PNPM-Mandiri, yang berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan di kelurahan Demangan, dan dicapai dari proses panjang dalam menggugah partisipasi aktif masyarakat untuk mensukseskan program BKM tersebut, dan hasilnya dapat menekan angka kemiskinan pada setiap periode yang terjadi di Kelurahan Demangan,

Kompleksitas persoalan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat Demangan secara berangsur akan dapat berkurang, partisipasi masyarakatpun menjadi tonggak awal adanya suatu kerjasama antara pihak luar dan masyarakat sendiri, untuk melakukan pembebasan dari belenggu kemiskinan yang ada. Untuk itu keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan, merupakan wujud dari adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara berbagai elemen masyarakat baik dari tingkat pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta)**. Untuk menghindari kemungkinan banyaknya interpretasi dan salah tafsir terhadap maksud judul tersebut, maka cukup penting bagi penulis untuk memberikan penegasan terhadap istilah-istilah pada judul skripsi ini. Adapun istilah yang dimaksud adalah:

1. Pemberdayaan Masyarakat.

Secara etimologi Pemberdayaan berasal dari kata *daya* yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu.¹ Imbuhan pada kata *pemberdayaan* mempunyai arti berusaha meningkatkan dengan melakukan sesuatu. Sedangkan di dalam istilah Bahasa Inggris disebut dengan kata “*empowerment*”. Menurut William Webster, *empowerment* memiliki dua arti, pertama berarti *to give power or authority to*, yaitu memberikan kekuasaan atau kekuatan pada pihak

¹ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet VIII, 1996), hlm.233.

lain. Dan pengertian kedua adalah *to give ability or enable* yaitu upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.²

Istilah pemberdayaan masyarakat menurut Koesnadi Hardjasoemantri adalah upaya sadar dan berencana menggunakan atau mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.³

Esrom Aritonang menambahkan pemberdayaan sebagai usaha untuk mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi sumber daya masyarakat agar membela dirinya.⁴ Masyarakat adalah sekumpulan atau sejumlah besar orang yang menyatu dan menempati wilayah tertentu.⁵ dan merupakan kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem-sistem, adat-istiadat, ritus-ritus, serta hukum-hukum khas, dalam hidup bersama.⁶ Definisi lain pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok,

² Onny S. Prijono, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996), hlm.3.

³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan*, sebuah pendekatan hukum lingkungan dalam Muhammadiyah dan pemberdayaan rakyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 61.

⁴ Esrom Aritonang dkk, *pendampingan komunitas pedesaan*, (Jakarta : Sekretariat Bina Desa, 2001), hlm.9.

⁵ Kamarul Zaman dan M. dahlan Al barry, *Kamus Ilmiah Serapan*, (Yogyakarta: Absolute, 2005).

⁶ A.R Tilar, *Pendidikan kebudayaan dan masyarakat madani Indonesia*, (Bandung : Rosda karya, 1999), hlm.9.

dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan⁷

Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek prinsipil dari manusia di lingkungannya, yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut dapat dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.

Adapun makna pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu upaya partisipasi bersama secara terprogram, terarah, terorganisir untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi kurang sejahtera sampai miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

2. Mengurangi Kemiskinan (*Poverty Reduction*)

Istilah *mengurangi*, digunakan sebagai indikator untuk mengukur persentase perubahan jumlah penduduk miskin yang menjadi sasaran program. Perhitungan tersebut dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin sebelum adanya program dan jumlah

⁷http://www.pnpm_mandiri.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=51&Itemid=46 (di akses pada tanggal 23 juni 2008).

penduduk miskin sesudah adanya program⁸. Istilah ini digunakan karena melihat banyaknya tingkat kemiskinan yang berubah-ubah jenis serta beragamnya persoalan yang melatar belakangnya, sehingga pemerintah merasa persoalan kemiskinan akan terus ada setiap periodenya, dan cukup kesulitan untuk di beranatas. dengan senantiasa berjuang melalui berbagai program, maka kemiskinan hanya mampu di kurangi dan ditanggulangi.

Pada awalnya kemiskinan selalu dikaitkan dengan faktor ekonomis, yang dinyatakan dalam ukuran tingkat pendapatan (*income*) atau tingkat konsumsi individu atau komunitas. Ada beberapa kriteria penduduk miskin di Indonesia. Sebelum tahun 1993, seseorang dikategorikan miskin apabila total pengeluaran yang dibutuhkan untuk pembelian makanan senilai 2100 kalori per kapita per hari.⁹ Lembaga donor internasional seperti Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia (ADB), sebagai contoh, pada periode sebelumnya menggunakan tingkat pendapatan \$2 per hari sebagai batas *proverty line*.¹⁰ Sementara di negara-negara berkembang kemiskinan diukur dengan

⁸ http://www.jurnalekonomirakyat.org/edisi_14/artikel_3.htm (di akses pada tanggal 2 Juli 2008).

⁹ Kriteria tersebut merupakan garis batas kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS (*Badan Pusat Statistik*). Adapun Garis Kemiskinan pada 2006 adalah pendapatan Rp158.051 per kapita per bulan yang merupakan rata-rata, perkotaan Rp179.144 per kapita per bulan dan perdesaan Rp135.896perkapitaperbulan.

¹⁰ <http://www.worldbank.org/FILEEXIT/pembangunan-manusia-dan-pemberdayaan-masyarakat-miskin/htm> (diakses pada 12 juli 2008).

tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, yang dinyatakan dalam ukuran kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan kalori.

Dalam memahami kemiskinan menurut Indra Darmawan, terdapat beberapa pendekatan. *Pertama*, pendekatan pendapatan (*Income Approach*) yaitu seseorang disebut miskin jika pendapatan dan konsumsinya berada dibawah tingkat tertentu yaitu tingkat pendapatan dan pengeluaran minimal yang layak secara sosial. *Kedua*, pendekatan kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*) seseorang disebut miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, sandang, papan, sekolah dasar, dan lain-lain. *Ketiga*, pendekatan aksesibilitas, yaitu seseorang miskin karena kurangnya akses terhadap aset produktif, akses terhadap infrastruktur sosial dan fisik, akses terhadap informasi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap teknologi. *Keempat*, pendekatan kemampuan manusia (*Human Capability Approach*), artinya seseorang disebut miskin jika tidak memiliki kemampuan yang dapat berfungsi pada tingkat minimal. *Kelima*, pendekatan ketimpangan (*Inequality Approach*) yang merupakan pendekatan kemiskinan relatif. Sementara menurut Bank Dunia kemiskinan diartikan sebagai:

Poverty is hunger. Poverty is lack of shelter. Poverty is being sick and not being able to see a doctor. Poverty is not being to go to school and not knowing how to read. Poverty is not having a job, is fear for the future, living one day at a time. Poverty is losing a child to illness brought about by

*unclean water. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom.*¹¹

Namun sejak tahun 1993, Indonesia telah mengadopsi *Basic needs approach* yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan dan non-makanan.¹² Kemudian pada tahun 1996, BPS memperbaharui metode penghitungan garis kemiskinan untuk memasukkan komponen pengeluaran bukan makanan secara lebih memadai.

Dari definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kemiskinan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah keadaan masyarakat atau penduduk Kelurahan Demangan yang berada pada kondisi ketika komponen individu yang hidup didalam wilayah tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara baik, seperti pangan, sandang, kesehatan dan papan.

3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri

PNPM-Mandiri adalah program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan dasar sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui harmonisasi, pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan serta pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan

¹¹<http://www.worldbank.org/Safetyweb/in-indrawan/htm>.(diakses pada 28 Januari 2009).

¹²<http://indradarmawanusd.wordpress.com/2006/12/02/pembangunan-manusia-dan-pemberdayaan-masyarakat-miskin/> (diakses pada 12 juli 2008).

yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat secara optimal dalam mengatasi problem-problem kemiskinan yang terjadi.

Melalui program tersebut masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah-masalah yang mereka hadapi. Artinya, dengan program ini, masyarakat hendaknya Mandiri secara dan dapat pro aktif menentukan sendiri apa yang harus dilakukan agar mereka terbebas dari kemiskinan.

Adapun maksud dari keseluruhan judul skripsi tersebut adalah upaya bersama secara terprogram, terarah, terorganisir untuk memberdayakan masyarakat yang berada pada kondisi miskin agar dapat terlepas dari kemiskinannya, melalui program PNPM-Mandiri yang di terapkan pada masyarakat Kelurahan Demangan, Gondokusuman.

B. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, agar cita-cita kesejahteraan dapat tercapai dengan lebih dinamis. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan

perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan bangsa Indonesia, yang ditandai dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2006 penduduk miskin di Indonesia berjumlah 39,05 juta jiwa atau 17,75 persen dari jumlah seluruh penduduk. Penduduk miskin ini menjadi perhatian pemerintah sehingga pada kabinet Indonesia bersatu, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama.

Target penurunan jumlah penduduk miskin seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 pada akhir tahun 2009 adalah 8,2 persen. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui *triple track strategy* pemerintah, yaitu penanggulangan kemiskinan (*pro-poor*), perluasan kesempatan kerja (*pro-job*) dan peningkatan pertumbuhan (*pro-growth*).

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan sejak lama dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri mulai tahun 2007 yang dinyatakan dengan keputusan presiden nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Melalui

program tersebut dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin. Tujuannya agar masyarakat mampu berdaya dan dapat ditumbuh kembangkan, sehingga mereka bukan hanya sebagai obyek melainkan sekaligus sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan tersebut.

PNPM-Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai sektor departemen dan pemerintah daerah. Pelaksanaannya juga diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat kedalam kerangka kebijakan program, cakupan pembangunannya diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir.

Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals (MDGs)*.¹³ Pelaksanaannya yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan

¹³ MDGs adalah kesepakatan global dengan target utamanya untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat dunia.

yang terukur diharapkan akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs Yaitu:

1. *Eradicate extreme poverty and hunger*, yaitu mengurangi proporsi penduduk yang hidup dibawah kemiskinan ekstrim pada tahun 2015.
2. *Achieve universal primary education*, memberikan pendidikan dasar untuk seluruh masyarakat.
3. *Promote gender equality and empower women*, mengeliminasi ketimpangan gender di masyarakat.
4. *Reduce child mortality*, menurunkan tingkat kematian anak di bawah usia lima tahun.
5. *Improve maternal health*, menguragi angka kematian ibu hamil.
6. *Combat HIV/ AIDS, malaria and other disease*, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.
7. *Ensure environmental sustainability* menjamin kelestarian lingkungan hidup.
8. *Develop a global partner-ship for development*, artinya mengembangkan kemitraan global.¹⁴

Sebagai kerangka pemberdayaan yang mencakup kebutuhan masyarakat miskin bersifat nasional dan dilakukan oleh 13 Departemen, 1 Lembaga negara dibawah kendali menteri koordinasi kesejahteraan rakyat ini, menempatkan masyarakat sebagai penentu

¹⁴ <http://www.undp.or.id/mdg/targets.asp>

arah solusi persoalan yang mereka hadapi, selain itu program tersebut juga memberikan peluang yang luas bagi daerah untuk menerjemahkannya kedalam suatu kerangka kebijakan program yang bersifat kedaerahan sesuai dengan pemetaan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Tujuannya tidak lain adalah sebagai upaya bersama secara partisipatoris dalam mengatasi persoalan kemiskinan di masyarakat.

Masyarakat Kelurahan Demangan, merupakan salah satu kelompok masyarakat dengan persoalan yang kompleks terutama dibidang kemiskinan, struktur masyarakat yang terdiri dari masyarakat urban dan masyarakat asli, membuat persoalan kemiskinan menjadi persoalan yang cukup susah ditanggulangi bahkan dihapuskan, karena kebanyakan masyarakat bukan penduduk yang menetap, hal inilah yang mengindikasikan kemiskinan di Kelurahan Demangan itu hanya dapat dikurangi.

Berbagai program yang digulirkan selama ini efektifitasnya kurang begitu terasa di masyarakat Kelurahan Demangan, dan terkesan hanya sebagai formalitas, diantara penyebabnya adalah pelaksanaan konsep yang kurang mengena akibat dari pemetaan yang kurang melibatkan masyarakat (partisipatoris). Adapun kegagalan teori *trickle down effect* yang mendasari kebijakan penanggulangan kemiskinan sebelumnya disebabkan karena:

Pertama, umumnya pertumbuhan penduduk berkembang lebih besar dari pada pertumbuhan ekonomi sehingga secara komparatif hal tersebut tidak memberikan peningkatan taraf hidup secara signifikan. Selanjutnya, adanya ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin, membuat *output* pertumbuhan tersebut tidak terdistribusi secara merata.

Kegagalan program kemiskinan itu sebetulnya berakar dari anggapan klasik masyarakat bahwa mereka merasa program yang diterima merupakan program hibah, dan tidak perlu mengembalikannya, karena dana yang ada merupakan dana negara yang tidak wajib dikembalikan dan inilah yang menjadi penyebab partisipasi masyarakat sangat kurang.

Oleh sebab itu sasaran dari penelitian ini membahas tentang keterlibatan masyarakat Kelurahan Demangan dalam program pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah kota Yogyakarta melalui program PNPM-Mandiri. Hal ini didasarkan pada implementasi program tersebut yang merupakan program tindak lanjut dari program penanggulangan kemiskinan sebelumnya, sehingga penulis merasa perlu menyinggung persoalan ini secara lebih rinci, karena melihat dari hasil evaluasi masyarakat pada program pemberdayaan sebelumnya, implementasi adalah titik awal pelaksanaan konsep yang dirumuskan bersama.

Persoalannya adalah apakah program tersebut mampu berjalan sesuai dengan konsep, keinginan serta tujuannya, yakni memberdayakan masyarakat secara partisipatif sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu adanya proses perumusan, pelaksanaan dan koordinasi yang baik. Hal inilah yang menarik penulis untuk meneliti mengenai konsep partisipatoris dan implementasi program tersebut, tujuannya sebagai telaah bersama agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara lebih dinamis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penegasan istilah dan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan persoalan yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana konsep program PNPM-Mandiri dan penerapannya dalam memberdayakan masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan di Kelurahan Demangan, Gondokusuman Yogyakarta?.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konsep dan implementasi program PNPM-Mandiri di Kelurahan Demangan Kec. Gondokusuman Yogyakarta.
2. Mengetahui hasil yang dicapai oleh program PNPM-Mandiri terkait masalah pengurangan kemiskinan di Kelurahan Demangan Kec. Gondokusuman Yogyakarta

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kekayaan wacana mengenai pemberdayaan masyarakat bagi seorang pengembang masyarakat, terutama pada bidang implementasi, selain itu juga sebagai stimulan terbentuknya dialektika wacana kritis dengan wacana kontemporer, sehingga tercipta pemahaman yang mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat yang partisipatoris, progresif dan kontekstual.

2. Kegunaan Praktis

Dengan melihat konsep, penerapan serta hasil yang dicapai dari program PNPM- Mandiri, maka hasil penelitian ini akan mampu memberikan masukan dan memberikan data stimulant bagi penelitian selanjutnya dengan masalah yang sama, atau penelitian dengan pokok bahasan yang bersinggungan dengan penelitian ini.

Secara internal kelembagaan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif secara obyektif bagi pemerintah kota Yogyakarta dan pemerintah Kelurahan Demangan pada khususnya, dalam mengevaluasi dampak adanya program PNPM-Mandiri yang diterapkan di Kelurahan Demangan terhadap tingkat keberhasilannya dalam mengurangi kemiskinan. Dan sebagai telaah atas efektifitas upaya yang dilakukan, artinya apabila program ini mampu mengurangi kemiskinan maka untuk langkah selanjutnya harus dipertahankan dan

di tingkatkan, namun apabila yang terjadi justru sebaliknya maka harus dilakukan peninjauan ulang terkait kelemahan yang terjadi, agar cita-cita kemandirian masyarakat dapat terwujud.

F. Telaah Pustaka

Untuk menunjukkan independensi dan spesifikasi, atau fokus dalam penelitian ini, maka penulis perlu menelaah tentang penelitian yang telah ada. Adapun penelitian yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat, memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun penelitian yang secara khusus memfokuskan pada konsep partisipatoris dalam pengentasan kemiskinan masih relatif sedikit, yaitu skripsi yang ditulis oleh Ade Jalil Hermawan yang berjudul *Dakwah dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Atas Pemikiran KH. MA. Sahal mahfudz)*, membahas tentang dakwah kaitannya dengan konsep pengentasan kemiskinan, hasilnya adalah pemberdayaan dan pengembangan eksistensi dakwah dalam kaitannya dengan perbaikan hidup masyarakat miskin dan terbelakang, selain itu memberikan gambaran tentang gagasan KH. MA. Sahal Mahfudz, mengenai dakwah dengan model partisipasif atau keteladanan yang memberikan motifasi pada sasaran agar mau membangun.¹⁵

Kedua yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Ade Zulkhan Suparman, berupa skripsi jurusan PMI yang berjudul "*Peran badan*

¹⁵ Ade Jalil Hermawan, *Dakwah dan pengentasan kemiskinan* (Studi atas pemikiran KH. MA. Sahal mahfudz), Skripsi Fakultas Dakwah 2001 (tidak diterbitkan)

usaha kredit pedesaan dalam mengentaskan kemiskinan di desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta”.

Penelitian tersebut berhasil mengungkap peranan badan usaha desa dalam memberikan solusi kemiskinan yaitu dengan melalui pemberian kredit, penggalangan dana masyarakat berupa tabungan, serta pendampingan konsultan kewirausahaan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak badan usaha tersebut.¹⁶

Yang ketiga yaitu artikel Felix Adam,¹⁷ yang mengupas tentang efektifitas pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dalam membantu rehabilitasi gempa, dalam tulisannya beliau menyoroti langkah- langkah pengambil kebijakan dalam mengatasi persoalan kemiskinan, yang hanya bertumpu pada sektor ekonomi saja, padahal lebih jauh persoalan kemiskinan itu sangat kompleks,

Dalam kesimpulannya beliau menulis bahwa proyek-proyek yang digulirkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan sebaiknya tidak hanya pada sektor ekonomi saja, sebab persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pembangunan ekonomi atau bantuan finansial, melainkan yang lebih utama adalah pemberdayaan agar mereka dapat Mandiri.¹⁸

¹⁶ Ade Zulkhan Suparman, *Peran badan usaha kredit pedesaan dalam mengentaskan kemiskinan di desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Skripsi fakultas dakwah 2007 (tidak diterbitkan)

¹⁷ Beliau adalah pengamat sosial dan kemiskinan dari universitas pajajaran Bandung.

¹⁸ <http://www.bempaapfeunpad.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=9>

Sedangkan penelitian ini membahas tentang konsep dan implementasi program PNPM-Mandiri yang fokusnya pada pemberdayaan masyarakat partisipatoris dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan yang dilakukan dengan melibatkan secara langsung peranan masyarakat dalam mengawal program, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, terutama di Kelurahan Demangan Kec. Gondokusuman Yogyakarta. Jadi penelitian tersebut belum pernah dibahas oleh penyusun lain.

G. Kerangka Teoritik

1. Dialektika teori *State Development* dengan *Society Development* (*people-centred development*).

Hampir semua orang pernah mendengar istilah pembangunan (development), tetapi apa yang dibayangkannya bisa jadi sangat berbeda. Hal ini terkait erat dengan perkembangan teori pembangunan yang sudah diimplementasikan dalam proses pembangunan di banyak Negara maju dan berkembang. Sebagaimana teori-teori besar di dunia, teori pembangunan juga mengalami perkembangan yang cukup dinamis dalam merespon realita perubahan sosial yang terjadi di banyak Negara berkembang.

Perkembangan teori pembangunan menurut Chasan ascholani adalah:¹⁹

¹⁹ <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20080808105753>

Pertama, teori pembangunan yang dimunculkan oleh kalangan neoliberal paska perang dunia ke-II. Teori ini muncul dari kepentingan banyak negara untuk membangun negaranya setelah perang yang berkepanjangan. Dasar teori ini adalah untuk menciptakan pembangunan yang mendorong terwujudnya pasar bebas (free market). Karena, sistem pasar bebas dianggap mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang melanda banyak negara berkembang. Sistem pasar bebas ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya, dan manfaatnya akan mengalir juga kepada orang miskin (trickle down effect theory). Salah satu penggagas teori ini yang terkenal adalah Rostow. Teorinya yang terkenal adalah teori “Lima tahapan pertumbuhan Ekonomi”.

Kelima tahapan tersebut adalah:

- a. Masyarakat tradisional
- b. Persiapan menuju tinggal landas
- c. Tinggal landas
- d. Masyarakat dewasa
- e. Masa tingginya konsumsi masyarakat.

Kedua, teori pembangunan yang dimunculkan oleh kelompok pendukung structuralism. Kelompok ini menganggap bahwa pasar tidak bisa menyelesaikan persoalan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan, maka negara harus mengontrol pasar. Kemudian, teori

ini dikenal dengan nama “*developmental state theory*”. Artinya, negara adalah sebagai aktor utama pembangunan ekonomi.

Ketiga, untuk menengahi perbedaan tajam antara kelompok neoliberal dan structuralist, kelompok Keynesian memperkenalkan teori interventionism. Teori ini menganggap pasar dan negara adalah sama pentingnya, maka keduanya harus bekerjasama untuk pencapaian tujuan pembangunan. Pasar dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang diharapkan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan negara diharapkan untuk bisa membuat peraturan yang mendukung agar para pelaku pasar bisa bermain secara adil dan sehat. Perkembangan teori ini kemudian melahirkan teori institutionalism, yang melihat peran penting Negara dalam pengaturan pasar.

Dari Ketiga teori pembangunan tersebut, semuanya berorientasi pada perubahan ekonomi dan sosial. Sehingga, intervensi yang dilakukan diprioritaskan pada pengembangan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat. Selain itu juga beranggapan bahwa industrialisasi adalah perubahan penting untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan. Sedangkan perbedaannya terletak pada cara atau pendekatan dalam menjalankan industrialisasi tersebut.

Adapun ketidakpuasan terhadap pelaksanaan ketiga teori tersebut dalam melaksanakan pembangunan di negara-negara berkembang, memunculkan teori baru yang disebut *people-centred development*.

Teori ini menyatakan bahwa pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia, bukan pada pertumbuhan ekonomi melalui pasar maupun memperkuat negara seperti pada tiga teori tersebut.

Karena berbeda dengan ketiga teori sebelumnya, maka teori ini juga disebut sebagai *Alternative Development Theory*. Dua elemen penting yang ditekankan pada teori ini ialah partisipasi (*participation*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Dari sinilah kemudian memunculkan teori tentang empowerment yang dipandang sebagai pemaknaan alternatif terhadap pembangunan.

2. Konsep Partisipasi

Partisipasi menimbulkan berbagai penafsiran karena sangat seringnya istilah tersebut digunakan dalam slogan-slogan pembangunan. Menurut Joe Fernandez, Partisipasi mengandung dua makna sekaligus, yaitu:²⁰

a). Partisipasi Instrumental.

Partisipasi disebut instrumental ketika dipandang sebagai cara untuk mencapai sasaran tertentu dalam proyek pembangunan. Dalam partisipasi instrumental, inisiatif pelaksana proyek atau aktifitas datang dari pihak luar,

²⁰ Joe Fernandez, *Partisipasi Masyarakat dalam proses Pembuatan Kebijakan Publik; harapan yang harus di Perjuangkan*, (Kumpulan Buletin CAKAP, Vol.1, No.1, Januari, 2001), hlm 12

sedangkan partisipasi masyarakat yaitu dengan ikut dalam pelaksanaan proyek tersebut dalam bentuk kemitraan, dengan tujuan pelaksanaannya adalah kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan, dan tujuan partisipasi masyarakat didalamnya yaitu pencapaian saran-saran proyek tersebut secara efisien. Asumsi dari partisipasi semacam ini bahwa para perencana (pihak luar) lebih tahu apa yang terbaik bagi masyarakat, dan masyarakat tinggal melaksanakannya secara bersama-sama serta menikmati hasilnya. Dengan kata lain proses pengambilan keputusan berlangsung dari atas ke bawah (*top down*).

b). Partisipasi Transformasional

Sedangkan partisipasi transformasional adalah sebagai cara atau sarana yang bertujuan memberdayakan (*to empower*) masyarakat. Namun dalam partisipasi transformasional masyarakat terlibat sebanyak mungkin dalam pelaksanaan suatu proyek atau aktivitas, mulai tahap perencanaan hingga tahap evaluasi.

Suatu proyek atau aktivitas yang merupakan pencerminan kehendak masyarakat, dan proses pengambilan keputusan berlangsung dari bawah ke atas (*bottom up*) keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran suatu proyek sebagian besar bergantung pada masyarakat sendiri. Dengan demikian, selain memiliki kemampuan dan kemandirian yang makin tinggi,

masyarakat akan memiliki tanggung jawab lebih besar. Dalam partisipasi semacam itu, masyarakat diandaikan lebih tahu apa yang terbaik bagi diri mereka.

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam partisipasi transformasional tersebut, maka partisipasi bisa dipahami sebagai proses sekaligus cara bagi para stakeholders dalam mempengaruhi dan berbagi peran atas proses pembangunan, proses pengambilan keputusan (*decision making*) dan sumber-sumber daya (*resources*). yang dimaksud dengan para stakeholdes dalam konteks teori ini ialah masyarakat umum, sektor swasta atau bisnis, lembaga-lembaga perwakilan pemerintah dan lain-lain, mulai tingkat nasional sampai tingkat desa dan Kelurahan.

Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat umum sangatlah bervariasi tergantung masing-masing daerah, misalnya organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan, masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi, perguruan tinggi serta perorangan. Dan partisipasi transformatif inilah yang digunakan dalam pendekatan pelaksanaan PNPM-Mandiri. jadi konsep partisipasi yang digunakan dalam pendekatan pelaksanaan program PNPM-Mandiri yaitu sesuai dengan konteks partisipasi transformasional artinya program

pembangunan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama antara berbagai pihak dalam mengatasi persoalan secara bersama-sama.

Partisipasi bukanlah suatu proses yang seragam namun lebih merupakan suatu rangkaian pendekatan yang meliputi bentuk dan cara seperti :

- 1). *Berbagi informasi (Share Information)*, artinya informasi searah kepada masyarakat, disampaikan melalui media yang beragam misalnya tentang suatu penyampaian kebijakan pemerintah daerah atau sosialisasi peraturan pemerintah melalui surat kabar, majalah, brosur, selebaran, poster, tayangan radio dan televisi dan lain-lain.
- 2). *Konsultasi atau dialog*, yaitu informasi yang dilakuakn melalui dua arah diantara pemerintah dan masyarakat, misalnya evaluasi partisipatoris terhadap suatu proyek atau kegiatan disuatu daerah, pertemuan-pertemuan rapat konsultatif, penilaian warga terhadap manfaat yang mereka terima dari suatu proyek atau kegiatan, kunjungan kelapangan, wawancara terhadap warga suatu Kelurahan untuk mengetahui secara langsung manfaat suatu proyek atau kegiatan.
- 3). *Kerjasama*, artinya berbagai peran serta tugas dalam peroses pengambilan keputusan, perencanaan partisipatoris, di lakukan dengan kebersamaan untuk

menetapkan peran dan prioritas kerja para *stakeholders* mencakup kepanitiaan bersama, pembentukan gugus, pembagian tugas dan tanggung jawab dalam implementasi proyek atau aktivitas, serta mengadakan berbagai pertemuan untuk mengatasi perbedaan pendapat dan melakukan evaluasi bersama atas rancangan kebijakan dan revisi kebijakan.

- 4). *Pemberdayaan*, artinya pemberian wewenang dalam pengambilan keputusan, dan pengawasan atas sumber daya. Pola-pola interaksi politik dalam proses pengambilan keputusan, tingkat sosial ekonomi dan tingkat kesadaran politik masyarakat, kemampuan kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam struktur sosial, dan struktur politik disuatu negara, wilayah atau daerah sangat berpengaruh pada penentuan bentuk dan cara partisipasi yang lebih tepat digunakan dalam pelaksanaan suatu proyek atau kegiatan pembangunan.

Bentuk dan cara partisipasi yang dipergunakan disuatu negara, wilayah atau daerah yang sistem politiknya didominasi oleh pemerintah (*eksekutif*), tentu berbeda dengan negara yang menerapkan perimbangan kekuatan antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. walaupun demikian melalui berbagai

bentuk dan cara partisipasi tersebut, maka tujuan utama pembangunan yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan dalam masyarakat berkembang sangat cepat, dinamis makin bervariasi dan rumit, sehingga akan makin sulit pula pemerintah dapat mengatasinya sendiri. Rakyat semakin sadar akan hak-haknya, sehingga partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam penentuan kebijakan publik. Menurut Dedi Mulyadi partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam penentuan kebijakan publik karena beberapa faktor yang patut dipertimbangkan seperti²¹:

- a. Partisipasi menginginkan para pembuat kebijakan memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai persoalan dan kebutuhan nyata masyarakat ditingkat akar rumput.
- b. Partisipasi membangun kemitraan berdasarkan kepercayaan satu sama lain dan permufakatan antara eksekutif, legislatif dan masyarakat. Kepercayaan satu sama lain memungkinkan dialog, dan pemufakatan memungkinkan para stakeholders bekerja untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama. Dengan kemitraan semacam itu akan tumbuh rasa memiliki di kalangan masyarakat sehingga kelangsungan dan kualitas suatu proyek atau aktivitas pembangunan akan terjaga baik.

²¹ [http://Elisa.Ugm.Ac.Id/Files/Psantoso_Isipol/81yk2km0/Putu%20aria%20-%20Kebijakan Public Partisipasif.pdf](http://Elisa.Ugm.Ac.Id/Files/Psantoso_Isipol/81yk2km0/Putu%20aria%20-%20Kebijakan%20Public%20Partisipasif.pdf). (di akses pada tanggal 18 Nopember 2008)

- c. Partisipasi bermanfaat untuk menetapkan prioritas kebutuhan nyata masyarakat sehingga berdasarkan permufakatan bersama akan diketahui dengan tepat proyek atau kegiatan pembangunan apa yang perlu didahulukan dan apa yang berikutnya.
- d. Partisipasi membuka peluang untuk masuknya informasi dengan lancar. yang merupakan umpan balik (*Feedback*). Dengan adanya umpan balik, terjadi penyempurnaan berkelanjutan dalam pelaksanaan dan pemantauan suatu proyek atau aktivitas pembangunan. Pada gilirannya, hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan, penggunaan dana, dan pelaksanaan suatu proyek atau kegiatan pembangunan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan yang diistilahkan dengan kata “*empowerment*” adalah sebuah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.²² Kesadaran tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata apabila individu tersebut sadar dan mau berubah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat 13 :11

²² Eddy Ch. Papilaya, 2002.dalam Zubaedi, *Wacana pembangunan alternative*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Madia, 2007), hlm.42.

ان الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم (الرعد: ١١)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*”²³

*Menurut Jim Ife, empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge, and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community.*²⁴

Pemberdayaan artinya memberikan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya. Adapun konsep pemberdayaan menurut Jim Ife. Memiliki hubungan erat dalam dua konsep pokok yakni konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantage* (ketimpangan). Dan pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif,²⁵ yaitu:

a. Perspektif Pluralis

Perspektif pluralis adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain.

²³Al Qur’anul karim dan terjemah, (Madinah Al Munawwarah: Mujamma’ al malik Fahd, 1418 M), hlm. 370.

²⁴ Jim Ife dalam Zubaedi, *Wacana pembangunan alternative*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Madia, 2007), hlm.98.

²⁵ Jim Ife dalam *Wacana pembangunan alternative...* hlm.42-43.

b. Perspektif Elitis

Yaitu suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi, membentuk aliansi serta melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elit.

c. Perspektif strukturalis

Adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental serta berupaya menghilangkan penindasan struktural, seperti kelas sosial, jender, ras, atau etnis.

d. Perspektif post strukturalis.

Suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan kepada aspek intelektualitas dari pada aktivitas, aksi, atau praksis..²⁶

Adapun proses pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM-Mandiri merupakan upaya membangun kemampuan (*capacity building*) masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tiga-P (Pendampingan, Penyuluhan, dan Pelayanan) hal ini sesuai dengan perspektif pluralis. Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat harus dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Mengutip definisi *Asian Development Bank*

²⁶ Dr. zubaedi, M.Ag, MPd. *Wacana Pembangunan Alternative...*hlm.43.

(ADB), kegiatan pembangunan termasuk pemberdayaan masyarakat dianggap bersifat komprehensif jika menampilkan lima karakteristik²⁷

- a) Berbasis lokal
- b) Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
- c) Berbasis kemitraan
- d) Bersifat holistik (menyeluruh)
- e) Berkelanjutan.

Sedangkan upaya pemberdayaan masyarakat secara partisipatoris seperti dikatakan Ginanjar Kartasasmita, harus dilakukan melalui tiga arah. *Pertama*, menciptakan suasana iklim yang kemungkinan potensi masyarakat dapat berkembang (*enabling*). Artinya, setiap manusia atau masyarakat telah memiliki potensi, sehingga pada saat melaksanakan langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi yang telah dimiliki. *Kedua*, memperkuat daya atau potensi yang telah dimiliki masyarakat (*empowering*), artinya langkah-langkah pemberdayaan yang dilakukan agar mengarah pada sektor riil atau langkah nyata *Ketiga*, melindungi masyarakat (*protection*). Hal ini berarti proses pemberdayaan yang dilakukan dengan berupaya mencegah persaingan tidak seimbang serta praktik eksploitasi antara yang kuat terhadap yang lemah.²⁸

²⁷ Dr. zubaedi, M.Ag, MPd. *Wacana Pembangunan Alternative...* hlm.99.

²⁸ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: CIDES, 1996), hlm.145.

4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kelompok orang yang berada dalam ketidak mampuan untuk memuaskan kebutuhan dan keperluan-keperluan material seseorang.²⁹ Begitulah definisi awal tentang kemiskinan yang diutarakan oleh Oscar Lewis. Akan tetapi dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap berbagai teori yang berkembang di seputar kemiskinan dan berbagai latar belakang ideologi yang menyertainya, maka akan dikemukakan beberapa teori tentang kemiskinan sebagai berikut:

Pertama, Konservativisme, yaitu suatu aliran teori kemiskinan yang berpandangan bahwa kemiskinan berasal dari karakteristik khas orang-orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin, karena faktor-faktor yang bersifat inborn ada pada dirinya. Seperti sikap malas bekerja, boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa wira usaha, fatalistik, tidak ada hasrat untuk berprestasi. Dengan kata lain orang miskin adalah kelompok sosial yang memiliki budaya tersendiri, yaitu budaya kemiskinan (*culture of poverty*). Tokoh paham ini adalah Oscar Lewis.³⁰

Kedua, Liberalisme, penganut paham ini menyandarkan pandangan pada asumsi bahwa hakekatnya manusia itu makhluk yang

²⁹ Oscar Lewis dalam Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm.200.

³⁰ Jalaluddin rahmat, *Islam Alternative*, (Bandung: Mizan, cet.III 1989), hlm.92.

baik, tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Menurut mereka budaya kemiskinan yang diintrodusir oleh penganut paham konservatisme, hanyalah semacam “*realistic and situational adaptation*” pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Bila kondisi sosial ekonomi diperbaiki, dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama, maka budaya kemiskinan itu akan segera ditinggalkan. Orang miskin sebenarnya tidak berbeda dengan orang kaya, mereka hanya mempunyai posisi yang sangat tidak menguntungkan.³¹

Ketiga, Radikalisme, yaitu paham yang bertumpu pada asumsi bahwa kemiskinan disebabkan oleh adanya ketimpangan struktur ekonomi, politik dan sosial. Kemiskinan memang dilestarikan untuk memerankan fungsi penunjang bagi kepentingan kelompok dominan, elit penguasa (*ruling elite*), atau kelas kapitalis. Penganut paham ini berkeyakinan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang kooperatif, produktif dan kreatif. Orang-orang atau negara menjadi miskin karena mereka dieksploitasi dan dimiskinkan.³²

Dari beberapa penjelasan tersebut kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan teori konserfatifisme dan liberalisme, hal ini didasarkan pada terjadinya kemiskinan yang diteliti

³¹Jalaluddin rahmat, *Islam Alternative...* hlm.93.

³² Dorojatun kuntjoro jakti, *Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 256.

lebih banyak disebabkan karena faktor internal orang, serta lingkungan dan kesempatan yang kurang.

5. Islam dan kemiskinan

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam Memahami kemiskinan, secara normatif, penulis lebih cenderung pada teori menurut K.H. Ali Yafie, yang berpandangan bahwa ajaran Islam yang dijabarkan dalam fiqih melihat ada tiga faktor yang berkaitan dengan masalah kemiskinan seseorang: *Pertama*, harta benda yang dimiliki secara sah dan berada ditempat (*mal mamluk hadhir*). *Kedua*, mata pencaharian (Pekerjaan) tetap, yang dibenarkan oleh hukum (*al-kasb al-halal*). *Ketiga* kecukupan (*al-kifayah*) akan kebutuhan hidup yang pokok. Atas landasan faktor-faktor tersebut dirumuskanlah, bahwa si miskin adalah barang siapa yang memiliki harta benda atau matapencaharian tetap, yang hanya menutupi seperdua atau lebih dari kebutuhan pokoknya.³³

Oleh karena itu menurut Yusuf Qardawi menyebutkan bahwa kemiskinan yang terjadi pada manusia sangat membahayakan individu maupun masyarakat dipandang dari berbagai aspek diantaranya adalah³⁴ :

³³ K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan 1994), hlm.171.

³⁴ Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema insani press, 1995), hlm. 23-26.

a. Kemiskinan dapat membahayakan akidah

Bagi orang miskin yang hidup diantara orang-orang kaya, sementara mereka (orang kaya) hanya bersenang-senang tanpa memperdulikan kehidupan disekitarnya. Maka kondisi ini akan menimbulkan keraguan bagi si miskin akan kebijaksanaan Allah SWT mengenai pembagian rizki. Akibat dari kemiskinan dan ketimpangan sosial tersebut bisa timbul penyimpangan akidah, sebagaimana sabda Rasul dalam Haditsnya:

كاد الفقر ان يكون كفرا... (رواه ابو نعيم)

“ *Hampir saja kefakiran itu menjurus kepada kekufuran...*” (HR. Abu Na'im).³⁵

b. Kemiskinan dapat membahayakan keluarga

Sebagaimana firman Allah SWT :

ولا تقتلوا اولادكم خشية اِِملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئنا كبيرا
(الاسراء : ٣١)

“ *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al Isra' :31)*³⁶

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله (النور : ٣٣)

“ *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sehingga Allah*

³⁵Muhammad Nasiruddin Albany, *Al Da'if Jami' al Shaggier Wa Ziyadatuhu Al Fat'h Al Kabir*, (Beirut: Al Mahtab Al Islamy,1990), hlm. 605.

³⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm.428.

*memampukan mereka dengan karunia-Nya” (QS. An-Nur : 33).*³⁷

Ayat tersebut sangat jelas menerangkan bahwa kemiskinan merupakan ancaman terhadap keluarga, baik dalam segi pembentukan, kelangsungan, maupun keharmonisannya.

c. Kemiskinan dapat membahayakan akhlak dan moral.

Selain berbahaya terhadap akidah dan keimanan, kemiskinan juga berbahaya terhadap akhlak dan moral. Kemelaratan dan kesengsaraan seseorang khususnya bila ia hidup diantara golongan orang kaya yang tamak, sering mendorongnya untuk melakukan tindakan pelanggaran sehingga mereka mengabaikan hati nurani serta meragukan nilai-nilai agama.

d. Kemiskinan dapat mengancam kestabilan pemikiran dan masyarakat

Lebih jauh lagi, kemiskinan berbahaya terhadap keamanan dan kestabilan masyarakat. Mungkin saja orang bisa bertoleransi apabila kemiskinan yang terjadi itu disebabkan sumber penghasilan yang sedikit, tetapi lain halnya bila kemiskinan itu disebabkan tidak adanya pemerataan, serakahnya segolongan orang, berfoya-fojanya segolongan kecil masyarakat diatas penderitaan saudaranya. Kemiskinan seperti ini dapat

³⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*... hlm. 549.

menimbulkan keresahan dan kegoncangan ditengah masyarakat dan dapat menimbulkan kecemburuan sosial serta mengancam kestabilan masyarakat.

Untuk menghindari terjadinya beberapa kemungkinan yang ditimbulkan akibat kemiskinan tersebut. Islam memandang sangat perlu bahwa perbedaan antara kaya dan miskin untuk dihapuskan atau paling tidak dikurangi. beberapa prinsip yang harus ditempuh menurut agama Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an adalah:

1. Bahwa dalam hidup ini agar saling mengenal dan tolong-menolong.

يأيتها الناس إتآخلقنا كم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عندالله أتقكم إن الله عليم خبير (الحجرات : ١٣)

“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu bangsa-bangsa, bersuku-suku agar supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu dihadirat Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal ” (QS Al-Hujurat: 13)³⁸

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان(المائدة:٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S. Al-maa-idah: 2).³⁹

³⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*...hlm.847.

³⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*...hlm. 156.

2. Diwajibkan bagi kaum muslimin untuk memperhatikan dan membantu orang miskin dan orang-orang yang berada dalam kesulitan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-maa'un ayat 1-3:

أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين (الماعون: ٣-١)

“Taukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” (QS. Al maa'un: 1-3)⁴⁰

3. Agama Islam mendorong umat agar selalu beramal dan bersedekah

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنا بل في كل سنبله مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم (البقرة: ٢٦١)

“Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh butir ,pada setiap butir tumbuh seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi orang yang menghendaki-Nya. Dan Allah maha luas (kurnia-Nya) dan maha mengetahui.” (QS. Al-baqarah: 261).⁴¹

وما انفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرزقين (سبأ: ٣٩)

“Apa saja yang kamu belanjakan untuk amal kebaikan, pasti akan diganti oleh Allah, dan dia adalah sebaik-baik yang memberi rizki”. (QS. Saba':39).⁴²

⁴⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*...hlm. 1108.

⁴¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*...hlm. 65.

⁴² Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*...hlm. 690.

4. Bahwa setiap muslim diwajibkan membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena .diantara hikmah zakat adalah kepedulian sosial.

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلواتك
سكن لهم والله سميع عليم(التوبة: ٣-١)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (QS. At- taubah : 103)⁴³.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara resmi dan intensif di Kelurahan Demangan setelah adanya surat ijin penelitian dari Bappeda Propinsi DIY, Kota Yogyakarta, Kecamatan Gondokusuman, Kelurahan Demangan, yaitu mulai bulan Oktober 2008 sampai pada bulan Desember 2008, dan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam rumusan masalah penelitian, yaitu tentang dampak adanya program PNPM-Mandiri terhadap pengurangan kemiskinan.

Adapun lokasi penelitian berada di wilayah Kelurahan Demangan tepatnya di BKM Kelurahan Demangan Kec. Gondokusuman Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan ini kebetulan berbarengan dengan adanya program PNPM-Mandiri yang sedang berjalan, sehingga peneliti hanya mampu melihat hasil dari proses program

⁴³ Depag RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*...hlm.297-298.

tersebut melalui data yang telah tersedia, dan persoalan pembentukan serta sejarah BKM sendiri peneliti dapatkan dari data sekunder yang telah ada dan peneliti hanya memverifikasi ulang,. Sehingga penelitian ini lebih difokuskan pada program yang sedang berjalan, serta dampaknya terhadap masyarakat penerima program.

Dalam pengumpulan data yang relevan dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara Mendalam (Interview)

Metode wawancara ini peneliti lakukan sebagai bentuk kajian silang yang bertujuan saling melengkapi, sebagai solusi atas minimnya data yang tersedia di BKM Demangan, serta kebuntuan dalam memperoleh data yang baru dan akurat. Adapun wawancara yang dilakukan antara lain: dengan informan yaitu Ka.dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta bapak Hendra tantular, dan Ibu Murti penanggung jawab PNPM-Mandiri di Kecamatan Gondokusuman. Serta Bpk. Kartiko (Ka.Sie. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan). Wawancara ini digunakan untuk menggali tentang konsep PNPM-Mandiri serta mencari obyektifitas data, atau verifikasi kebenaran data secara lebih mendalam, dan menghindarkan manipulasi data yang dilakukan oleh beberapa pihak kelurahan, atau pengurus BKM terkait adanya program tersebut.

Wawancara selanjutnya dengan ketua BKM Demangan yaitu Bapak H.Ilham mengenai sejarah proses pembentukan BKM, namun

karena data-data yang berhubungan dengan BKM ternyata banyak dimiliki oleh sekretaris BKM yaitu bapak Sutanto Ilyas maka wawancara lebih banyak di tujukan kepada beliau, hal ini didasarkan pada pengalaman beliau yang sudah dari awal periode dan sangat aktif di BKM. Sehingga sampai sekarang masih memegang kesekretariatan, maka dianggap lebih tahu masalah yang berhubungan dengan BKM Demangan

Selain itu juga wawancara kepada anggota KSM yaitu ibu Sarimo dan Ny. Sutanto, tujuannya memperoleh tanggapan secara langsung atas partisipasi keluarga miskin di Kelurahan Demangan terhadap program PNPM-Mandiri. Dan anggota lain yang kebetulan berada di BKM saat penelitian berlangsung. Atau anggota yang sedang dalam kesulitan pengangsuran, metode ini dilakukan secara langsung bertemu dengan responden baik di BKM, atau mendatangi kerumah warga.

banyak hal yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini, diantaranya kondisi emosi dan keadaan fisik subyek yang berubah-ubah, cuaca yang kadang kurang mendukung, serta waktu bertemu yang terkadang kurang tepat dengan kondisi emosional subyek, maka tidak jarang menjadikan penelitian ini agak terganggu, namun dengan berbagai pendekatan kultural, serta kesabaran yang dilakukan dan senantiasa menghormati kondisi, situasi emosional subyek, maka

pendekatan yang dilakukan ini cukup menunjang keberhasilan dalam wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan diambil dari buku-buku panduan, leaflet, buku laporan keuangan, laporan pertanggung jawaban, serta dokumen umum keanggotaan BKM. Hal ini karena penelitian yang dilakuakn adalah kasus program yang sedang dijalankan, dan proses awal telah di lalui, sehingga banyak dokumen yang sudah tersedia dan peneliti tinggal menganalisis kembali melalui sumber-sumber yang berkompeten.

Metode dekumentasi adalah cara memperoleh data dengan melihat dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi, dan menegaskan dokumen hasil wawancara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi untuk memilah data dan memperjelas sumber data, Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah model triangulasi melalui pemeriksaan sumber lainnya. Metode ini peneliti gunakan sebagai tindak lanjut adanya data yang kurang sinkron antara data hasil wawancara dan dokumen yang ada, sehingga untuk menjadikan data tersebut layak untuk digunakan dalam skripsi ini, peneliti menguatkan hasil penelitian dengan mencari sumber lainnya yang lebih berkompeten.

Setelah data yang dihasilkan layak untuk digunakan selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut. Adapun konsep analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini penulis menguraikan secara analitis mengenai hasil wawancara dan dokumentasi pelaksanaan program PNPM-Mandiri dan kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat partisipatoris untuk mengurangi kemiskinan di wilayah Kelurahan Demangan Kec. Gondokusuman kota Yogyakarta.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai konsep dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Implementasi di kelurahan Demangan, gondokusuman). Maka hasil penelitian ini, diperoleh data bahwa program PNPM-Mandiri di wilayah kelurahan Demangan telah diimplementasikan dengan mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat partisipatoris artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam mengawal adanya program pemberdayaan tersebut. Yang dimulai dari sosialisasi, refleksi, pemetaan, pelaksanaan, yang dilakukan oleh masyarakat.

Adapun bentuk partisipasi yang berlaku untuk menggerakkan masyarakat agar mengerti kebutuhannya yaitu bentuk partisipasi tranformasional, artinya antara masyarakat dan pihak luar secara bersama-sama mejadi subyek sekaligus obyek dari program tersebut. Hal ini dinyatakan dengan berdirinya BKM sebagai induk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan Demangan yang di bentuk beranggotakan para warga masyarakat dari Kelurahan Demangan yang ditunjuk oleh masyarakat, serta melibatkan fasilitator, adapun program yang bertujuan mengurangi kemiskinan adalah

melakukan program usaha pinjaman bergulir pada setiap warga yang sesuai dengan kriteria, dan melalui mekanisme yang berlaku dapat mengajukan menjadi anggota KSM dan berhak menggunakan dana tersebut, program ini adalah sebagai jawaban atau tindak lanjut dari pemetaan masalah warga. Selain itu juga melibatkan fasilitator yang berperan sebagai tenaga ahli dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah setempat.

Adapun implementasinya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan atau program yang dirancang masyarakat secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat miskin, terutama terfokus pada bidang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha dengan program pinjaman dana bergulir dengan jumlah anggota pada tahun 2007 sebanyak 640 orang.

Dari pertumbuhan tingkat kemiskinan menunjukkan angka yang positif, artinya terdapat penurunan angka kemiskinan selama 2 tahun terakhir yaitu rata-rata sebesar 0.18%. Dengan demikian, walaupun dipengaruhi oleh banyak faktor, namun sejak diterapkannya program pinjaman bergulir dari PNPM-Mandiri di kelurahan Demangan, maka kemiskinan masyarakat menjadi menurun. Walaupun tingkat penurunannya sangat kecil. Hal ini menjadi indikator tersendiri mengenai keberhasilan program PNPM-Mandiri di wilayah tersebut yang harus dipertahankan peningkatannya.

Namun disadari bahwa tolak ukur indikator kemiskinan menurut pemerintah memang masih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya proses pendataan kemiskinan yang dilakukan berdasarkan data-data yang terukur secara pasti dan telah ditentukan berdasarkan perbandingan pendapatan minimal perkapita penduduk, dan uji kelayakan fisik. Namun sangat berbeda ketika pendataan kemiskinan itu dilakukan oleh masyarakat sendiri, masyarakat lebih menggunakan pendekatan kualitatif, artinya keadaan secara nyata yang terjadi di lapangan itulah yang menunjukkan kemiskinan sebenarnya dengan indikator-indikator yang dirumuskan sendiri oleh masyarakat dan menyangkut keadaan wilayahnya sendiri.

Oleh sebab itu data yang terangkum di pemerintah merupakan data hasil audit ulang yang diambil dari masyarakat, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya data yang ada selama ini merupakan data yang dikolaborasikan dan merupakan proses kaji silang.

B. Saran-Saran :

1. Perlu diadakan upaya peningkatan dalam implementasi program PNPM Mandiri di setiap warga masyarakat agar tingkat kemiskinan dapat ditekan pada setiap periodenya.
2. Sosialisasi yang harus terus dilakukan agar program ini dapat menggiatkan partisipasi semua lapisan masyarakat, dan juga harus dibarengi dengan kesadaran dari masyarakat bahwa kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama.

3. Dengan senantiasa mendengarkan segenap masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, diharapkan akan meningkatkan efektifitas pelaksanaan program selanjutnya.

4. Kendala-kendala dalam masalah pelaksanaan program tersebut perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait, karena suksesnya pembangunan adalah berkat kerjasama dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

5. Pemberdayaan anggota harus terus di tingkatkan dan dikembangkan agar warga yang menjadi anggota BKM mampu mengembangkan usaha yang lebih bervariasi, dan efektifitas serta produktifitasnya dapat lebih meningkat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan manusia merupakan aspek yang terpenting dalam kegiatan pembangunan. Meskipun Indonesia dalam pencapaian MDGs masih menghadapi banyak persoalan dan tantangan, tidak ada alasan target tersebut tidak tercapai tahun 2015. Semua pihak harus berjuang keras untuk mewujudkan komitmennya. Hal lain yang harus dilakukan adalah pengembangan kemitraan global dengan lembaga-lembaga internasional. Terkait dengan anggaran pemerintah, sebenarnya cukup untuk memenuhi hak-hak dasar warga negaranya misalnya untuk pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Namun masalahnya kadang-kadang tidak tepat sasaran sehingga efisiensi penggunaan anggaran seharusnya dipertimbangkan

lebih matang, selain tentu saja pemenuhan anggaran sesuai amanat Undang-Undang.

C. Kata Penutup

Dengan berakhirnya penelitian ini maka penulis merasa ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang telah ikut berpartisipasi serta memberikan dorongan semangat berupa moril, materiil serta spirituil, atas tersusunnya tulisan skripsi ini, sebab peran sertanyalah penulis dapat menyusun dengan sebaik-baiknya. mudah-mudahan amal baiknya mendapat balasan yang lebih baik dari yang maha kuasa

Penyusunan skripsi ini tentunya masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun sangat mengharapkan kritik maupun saran dari pembaca yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dapat menjadi wacana yang berarti kedepannya bagi penulis dalam pengembangan diri pribadi penulis,

Akhirnya harapannya mudah-mudahan amal baik semua pihak akan mendapatkan balasan dari Allah SWT amin. Sungguh tiada yang lebih indah di dunia ini di bandingkan dengan karunia Allah SWT kelak di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Albany, Muhammad Nasiruddin, *Al Da'if Jami' al Shaggier Wa Ziyadatuhu Al Fat'h Al Kabir*, Beirut: Al Mahtab Al Islamy, 1990
- A.R Tilar, *Pendidikan Kebudayaan Dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 1999.
- Dorojatun Kuntjoro Jakti, *Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994
- Dr. Zubaedi, M.Ag., MPd, *Wacana pembangunan alternative; ragam perspektif pengembangan dan pemberdayaan masyarakat*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Madia, 2007
- Esrom Aritonang dkk, *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, Jakarta: sekretariat bina desa, 2001.
- Ginanjart Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: CIDES, 1996
- Irawan Soehartono, Dr, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2000.
- Jalaluddin Rahmat, *Islam alternative*, Bandung: Mizan, cet III 1989
- Joe Fernandez, *Partisipasi Masyarakat dalam proses Pembuatan Kebijakan Publik; harapan yang harus di Perjuangkan*, Kumpulan Buletin CAKAP, Vol.1, No.1, Januari, 2001
- Kenya Budiati, *Bahan kuliah kebijakan sosial*, Yogyakarta: tidak diterbitkan
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan*, sebuah pendekatan hukum lingkungan dalam Muhammadiyah dan pemberdayaan rakyat, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995.
- K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan 1994.
- Kamarul Zaman, dan M. dahlan Al barry, *Kamus Ilmiah Serapan*, Yogyakarta: Absolute, 2005
- Onny S., Prijono *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*, Jakarta: CSIS, 1996
- Partini, *laporan tentang metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian khususnya sosiologi*, Jakarta: Genada press, 1992

Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di perkotaan*; bacaan untuk antropologi perkotaan
Jakarta: YOI, 1995.

Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* Jakarta: Rajawali, 1986

W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka,
cet VIII,1996.

Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema
Insani Press, 1995.

BIBLIOGRAFI

Ernest green wood dan Robert R. Mayer, *Rancangan penelitian kebijakan sosial*
Jakarta: CV. Rajawali, 1984.

Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia
pustaka utama 1997.

Lexy J Moleong, *Penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2004

Moh Natsir, *Method penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Sumardi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada
2002.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pengantar*, Jakarta: Bina aksara,
cet XII, 2002

—————, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta:
Rineka Cipta, 1999

Skripsi

Ade Jalil Hermawan, *Dakwah dan pengentasan kemiskinan* (Studi atas pemikiran
KH. MA. Sahal mahfudz), Skripsi Fakultas Dakwah 2001

Ade Zulkhan Suparman, *Peran badan usaha kredit pedesaan dalam
mengentaskan kemiskinan di desa Maguwoharjo Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Skripsi fakultas dakwah 2007

Sumber Websides

<http://www.bempaapfeunpad.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=9>

http://www.pnpm_mandiri.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=51&Itemid=46

<http://www.indradarmawanusd.wordpress.com/2006/12/02/pembangunan-manusia-dan-pemberdayaan-masyarakat-miskin>

<http://www.undp.or.id/mdg/targets.asp>

<http://www.damandiri.or.id/file/ninghandayaniumsaddbab2.pdf>

http://www.jurnalekonomirakyat.org/edisi_14/artikel_3.htm

[http://Elisa.Ugm.Ac.Id/Files/Psantoso_Isipol/81yk2km0/Putu%20aria%20-%20Kebijakan Publik Partisipasif.pdf](http://Elisa.Ugm.Ac.Id/Files/Psantoso_Isipol/81yk2km0/Putu%20aria%20-%20Kebijakan%20Publik%20Partisipasif.pdf)

<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20080808105753>



Lampiran-lampiran

BIODATA PENULIS

Nama : Syukron Munjazi
Tempat Tanggal Lahir: Kudus, 20 Juni 1982
Alamat : Jln Kudus- Purwodadi Km.12 Ds. Undaan Tengah
Rt.03/01 Kec. Undaan Kab. Kudus. Kode pos 59372.
Anak yang ke : Dua dari empat bersaudara.(Khoirul Umam (kakak),
Abdul Wahab, dan Khusnul Aflah (adik).

Alamat E-Mail : 1. azzy_almunjazi@yahoo.com
2. munjazi@yahoo.co.id
3. munjazi.gmail.com.
Nama ayah : H. Sulaiman.
Nama ibu : Hj. Mundarni

Riwayat pendidikan:

1. MI Miftahul Falah Undaan Tengah : Tahun 1989-1995 (Pelajar)
2. MTs Nahdlatu Muslimin : Tahun 1995-1998 (Pelajar)
3. MTs Qudsiyyah : Tahun 1998-2001 (Santri Pelajar)
4. MA. Qudsiyyah : Tahun 2001- 2003 (Santri Pelajar)
5. UIN Sunan Kalijaga : Tahun 2004-2008 (Mahasiswa)

Pengalaman organisasi:

1. Bendahara jam'iyah tahtiman Al-Qur'an watartilahi
2. Anggota majlis Dzikir SBY "Nurussalam" Yogyakarta.
3. Anggota majlis Sholawat "Ahabul Mustofa jogja" pimpinan Al-Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf.
4. Ketua jam'iyah manaqib " Rhoudlotul fata"
5. Ketua BOM-F al- Hamro fakultas Dakwah periode 2006-2008
6. Penasehat Ikatan Remaja Sakura (IRSA) sampai sekarang.

Panduan Wawancara

Kepada pengurus BKM Demangan

1. Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya BKM demangan?
2. Apakah visi, misi, sasaran, tujuan yang ingin dicapai?
3. Bagaimana kerangka konsep kebijakan PNPM-mandiri diterjemahkan kedalam program penanggulangan kemiskinan di kelurahan demangan, dan program-programnya apa saja?
4. Apakah kendala yang dihadapi?
5. Bagaimana tanggapan dan partisipasi dari masyarakat?
6. Bagaimana peran fasilitator dan Sistem kontrolnya seperti apa?
7. Bagaimana Strategi dasar dalam menarik partisipasi masyarakat?
8. Peran pemerintahan setempat bagaimana?
9. Bagaimana sistem alokasi pendanaan dan penyalurannya?
10. Bagaimana efektifitasnya dalam mengurangi kemiskinan?
11. Adakah pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian masyarakat?

Kepada masyarakat miskin kelurahan Demangan:

1. Berapa lama anda menjadi anggota BKM Demangan?
2. Manfaat apa yang dirasakan setelah menjadi anggota BKM Demangan?
3. Bagaimana kontribusi BKM dalam mendukung serta memotivasi pengembangan usaha ekonomi?
4. Bagaimana keterlibatannya dalam mendukung eksistensi BKM?
5. Adakah pengaruh yang dapat dirasakan setelah mendapat pinjaman dana bergulir terhadap kelangsungan usaha masyarakat?

Kepada fasilitator kelurahan Demangan:

1. Kendala apa yang dihadapi di masyarakat terutama dari awal sosialisasi sampai sekarang?
2. Berapa lama datang mendampingi masyarakat?
3. Kontribusi apa yang anda berikan kepada BKM dalam membangun kerjasama dengan masyarakat, pemerintah setempat?
4. Bagaimana respon masyarakat atau antusiasme masyarakat dalam ikut menjaga keberlangsungan program ini?

Foto-foto BKM Kelurahan Demangan



Unit bagian pelayanan pinjaman bergulir



Ketua BKM dan tim fasilitator



Unit bagian administrasi BKM Demangan



Kantor BKM lama



Kantor BKM yang baru

Pemetaan swadaya masyarakat



Refleksi Kemiskinan



Pelayanan pinjaman bergulir



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda.diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 6040

Membaca Surat : Dekan F. Dakwah - UIN "SUKA" Yk No : UIN/2/PD.I/TL.01/1852/2008
Tanggal: 21 November 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : **SYUKRON MUNJAZI** No. Mhsw : 04230049
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PNPB-MANDIRI DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)-MANDIRI DI KELURAHAN DEMANGAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA)**
Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 25 November 2008 s/d 25 Maret 2009

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta Cq. Kadis. Perijinan;
3. Dekan F. Dakwah - UIN "SUKA" Yk;
4. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 25 November 2008

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2229

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070//6040 Tanggal : 25/11/2008

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta ;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta ;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : SYUKRON MUNJAZI NO MHS / NIM : 04230049
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah - UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Arif Maftuhin, M.Ag. MAIS
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PNPB-MANDIRI DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) - MANDIRI DI KELURAHAN DEMANGAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 25/11/2008 Sampai 25/02/2009
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

SYUKRON MUNJAZI

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Camat Gondokusuman Kota Yogyakarta
4. Lurah Demangan Kota Yogyakarta
5. Koordinator BKM Demangan Yogyakarta
6. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 27-11-2008.

An. Kepala Dinas Perizinan
Ka. Pag. Tata Usaha





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GONDOKUSUMAN
Jalan Munggur 32 Telp. (0274) 520234 Yogyakarta 55223

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 40

- Dasar
1. Surat izin / rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/6040 Tanggal : 25-11-2008
 2. Surat izin / rekomendasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta
Nomor : 070/1871 Tanggal : 19-09-2008
- Mengingat
1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pereizinan Kota Yogyakarta.
 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata dan Praktek Kerja Lapangan.

Diizinkan kepada :

Nama : **SYUKRON MUNJAZI**

No. Mhs / NIM. : 04230049

Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah - UIN Suka Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Penanggungjawab : **Arif Maftuhin, M.Ag, MAIS**

Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul : *Pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi Kemiskinan melalui program PNPM-Mandiri di Kota Yogyakarta*

Lokasi : Kelurahan Demangan

Waktu : 25 Nopember 2008 sampai tanggal 25 Februari 2009

Dengan ketentuan :


1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku;
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu kestabilan pemerintah serta hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
4. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta lewat Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Penerima izin,


SYUKRON MUNJAZI



27 Nopember 2008
An. Camat, Gondokusuman
Kep. Sek. Pemerintahan


Rini Rahmawati, SIP
NIP. 490 030 437

Tembusan kepada :

1. Lurah Demangan



PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA LAPANGAN
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH UIN SUNAN KALIJAGA
Jl. Marsda Adisucipto Tlp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta

S E R T I F I K A T

Nomor: 01/Prakda-PMI/1/2008

Diberikan Kepada:

Syukron Munjazi

NIM: 04230049

yang telah menempuh Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I, II, dan III selama 800 jam,
dengan keahlian Assessment, Analisis, Perencanaan, Intervensi Program dan Evaluasi Program.

Yogyakarta, 26 Januari 2008

Ketua Jurusan PMI,



Ketua KKL,

Asep Jahidien, M.Si
NIP. 150 378 121



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

No. : UIN.02/KPM/PP.06/202/2007

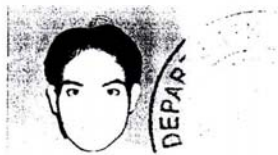
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Syukron Munjazi
Tempat dan tanggal Lahir : Kudus, 20 Juni 1982
Nomor Induk Mahasiswa : 04230049
Fakultas : Dekwah

Yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Pendek Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2006/2007 (Angkatan ke-61) di :

Lokasi/Desa : Srihardono 17
Kecamatan : Pundong
Kabupaten : Bantul
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari tanggal 9 Juli s.d. 6 September dan dinyatakan LULUS dengan nilai .95,00... (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata UIN Sunan Kalijaga dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti Ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 28 September 2007

Ketua


Drs. H. Mardjoko Idris, MA.
NIP. 150232845



PEJABAT KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SERTIFIKAT

Diberikan kepada

Nama : SYUKRON MUNJAZI
NIM : 04030041
Fakultas : Dakwah UIN Sunan Kalijaga

telah berhasil menyelesaikan

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

dengan predikat

MEMUASKAN

Ditandatangani oleh PRIBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
pada tanggal:

9 Januari 2009


Kepala Bina Sistem
Rizkiy Anandani
NIP. 196203279




Kepala PPKSI
M. Kom.
NIP. 196308349



**DEPARTEMEN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PUSAT BAHASA, BUDAYA & AGAMA**

Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax. (0274) 550820 Yogyakarta 55281

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.5/PP.00.9/0075/2009

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Syukron Munjazi**
Date of Birth : **June 20, 1982**
Sex : **Male**

took **TOEC (Test of English Competence)** held on **January 5, 2009** by Center for Language and Culture of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	31
Structure & Written Expression	37
Reading Comprehension	42
Total Score	367



Director,



Muhammad Amin, Lc., M.A.
NIP. 160253486

وزارة الشؤون الدينية
جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية جو كجاكرتا
مركز اللغات والثقافات



شهادة

No : UIN.01/L.0/PP.00.9/2091/2008

تشهد إدارة مركز اللغات والثقافات بأن :

الاسم : Syukron Munjazi :

تاريخ الميلاد : ٢٠ يونيو ١٩٨٢

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٥ يناير ٢٠٠٩ ، وحصل

على درجة :

١٨,٧	فهم المسموع
٧,٢	التركيب النحوية والتعبيرات الكتابية
٩,٨	فهم المقروء
٣٦	مجموع الدرجات

المدير
محمد أمين

١٥٠٢٥٣٤٨٦: التليفون

